BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan berkat di satu sisi, namun disisi lain sekaligus merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah untuk dapat melaksanakannya. Apabila kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terealisasi, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Darumurti et.al. 2003).

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah (Sidik et al., 2002:54). Visi otonomi dari sudut pandang

ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani et. al., 2005).

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001).

Dalam hubungan keuangan pemerintah pusat memberikan dana bantuan untuk pemerintah daerah yang berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah (www.ksap.org). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran

belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Cristy dan Adi, 2009).

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009).

Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum (Cristy dan Adi, 2009).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk . Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index (ppp)* (Cristy dan Adi, 2009).

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Cristy dan Adi, 2009).

Perbaikan pengalokasian dana untuk belanja modal selain belanja rutin ikut menopang pebaikan kesejahteraan. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya (Cristy dan Adi, 2009).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cristy dan Adi (2009) menunjukan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja

modal dengan nilai signifikansi 0,002 dan t sebesar 3,23. Sedangkan untuk variabel belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalah dalam bentuk penelitian dengan judul **"HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DENGAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA" (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian ini ingin membuat suatu perumusan masalah yaitu**:**

1. Apakah terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM)?
2. Apakah terdapat hubungan antara Belanja Modal (BM) dengan peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka tujuan dalam penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah terdapat hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM)?

2. Untuk menguji apakah terdapat hubungan Belanja Modal (BM) daerah dengan peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia?

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dijabarkan tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dosen dan akademisi dapat menambah wawasan tentang teori dan sebagai referensi data penelitian sejenis.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya akuntansi manajemen, penelitian ini dapat menambah wawasan khasanah pustaka tentang hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada prinsip dasar metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini berisi tentang dana alokasi umum, belanja modal, dan

kualitas pembangunan manusia. Hubungan dana alokasi umum dengan belanja modal, hubungan belanja modal dengan kualitas pembangunan manusia, tinjauan penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas ruang lingkup penelitian, populasi, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan-simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.